IMPLEMENTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Nini Marini

NIM. 07011381823138

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Nini Marini

NIM. 07011381823138

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Dwi Mirani, S.I.P., M. Si
NIP. 198106082008122002

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PADA KEBIJAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Skripsi
Oleh :

NINI MARINI
NIM.07011381823138

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal

Pembimbing :	Tanda Tangan
1. Dr. Lili Erina, M.Si. NIP. 196612301992032001	----------
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si NIP. 198106082008122002	----------
Penguji :	**Tanda Tangan**
1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si NIP. 196511171990031004	----------
2. Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001	----------

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Prof. Dr. Alfiri, M.Si NIP. 196601221990031004	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196914101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nini Marini
NIM	: 07011381823138
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lais, 4 September 2000
Program Studi / Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik / Kebijakan Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pertanyaan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian ini, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Nini Marini

NIM. 07011381823138

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman".

(Q.S Ali Imran : 139)

"Beranilah menjalani kehidupan yang Anda impikan untuk diri Anda sendiri. Bergeraklah maju dan buatlah impian Anda menjadi nyata".

(Ralph Waldo Emerson)

Dengan ridho Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. **Orang Tua yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.**
2. **Kedua saudari saya yang selalu memberikan nasihat dalam menyelesaikan skripsi.**
3. **Almamater kebanggaanku Universitas Sriwijaya**
4. **Teman dekatku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.**
5. **Teman seperjuanganku (Administrasi Publik Angkatan Tahun 2018)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan Inspektorat Pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan, khususnya di lingkungan Kota Palembang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward keberhasilan kebijakan publik dipengaruhi oleh empat aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Inspektorat Pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari ke empat aspek tersebut memiliki beberapa sub aspek yang belum efektif dilakukan oleh Inspektorat Kota Palembang pada saat melaksanakan pengawasan. Adapun saran dalam penelitian ini, diharapkan pihak Inspektorat Kota Palembang dapat meningkatkan cara yang lebih tepat dalam melakukan sosialisasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama pada masa pandemic covid-19; diharapkan dalam penerimaan pegawai untuk merekruit yang ahli dalam mengelola website pengawasan; dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengawasan melalui diklat; dan diharapkan dapat memenuhi fasilitas yang kurang dalam melakukan pengawasan terutama SPIP.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Inspektorat, Kebijakan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektorat

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M. Si
NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Dwi Mirani S.I.P., M. Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Mei 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Inspectorate's supervision on the Government's Internal Control System (SPIP) policy for Regional Apparatus Organizations in Palembang City. This research is motivated by the low application of the Government Internal Control System (SPIP) for Regional Apparatus Organizations that can affect government performance, especially in the city of Palembang. The theory used in this research is the theory of Policy Implementation proposed by George C. Edward III. According to Edward, the success of public policy is influenced by four aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method used in this study is a qualitative research method. The techniques used in data collection are interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the Inspectorate's supervision on the Government Internal Control System (SPIP) policy for Regional Apparatus Organizations in Palembang City is influenced by aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Of the four aspects, there are several sub-aspects that have not been effectively carried out by the Palembang City Inspectorate when carrying out supervision. As for the suggestions in this study, it is hoped that the Palembang City Inspectorate can improve a more appropriate way of socializing to Regional Apparatus Organizations (OPD), especially during the covid-19 pandemic; expected to recruit employees who are experts in managing surveillance websites; can improve the quality of Human Resources supervision through education and training; and is expected to meet the lack of facilities in conducting supervision, especially SPIP.

***Keywords:** Implementation, Supervision, Inspectorate, Policy, Government Internal Control System (SPIP), Regional Apparatus Organization (OPD), Inspectorate*

Advisor I

Dr. Lili Erina, M. Si
NIP. 196612301992032001

Advisor II

Dwi Mirani S.I.P., M. Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Mei 2022
Chairman of The Departement of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah Swt. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul "Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi PerangkatDaerah di Kota Palembang".

Penulis menyadari dalam skripsi ini terdapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. **Allah SWT**. Yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi ini.
2. **Kedua Orang Tua** sebagai penyemangat terbaik yang tidak pernah letih dalam memberikan dukungan secara moriil maupun material selama perkuliahan khususnya selama menyusun skripsi ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. **Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS** selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membantu memperlancar proses akademik selama delapan semester perkuliahan ini.
7. **Ibu Dr. Lili Erina, M.Si** selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
8. **Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan para staf akademik yang telah membantu segala kepentingan perihal administrasi dan akademik selama masa perkuliahan.

10. **Bapak Rediyan Deddy Umrien, SE, MM** selaku Sekretaris Inspektorat Kota Palembang serta selaku Penanggung Jawab dalam Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Peemerintah (SPIP).
11. **Bapak Rahman Hakim, SE, Ak. M.Si** selaku Kasubag Umum Kepegawaian Inspektorat Kota Palembang serta selaku Pembantu Penanggung Jawab dalam Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
12. **Ibu Nurhayati, S.IP., M.Si** selaku Pengendali Teknis dalam Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Peemerintah (SPIP).
13. **Bapak Kosriadi, S.IP., M.Si** selaku Ketua Tim dalam Pengawasan Sistem Pengendalian Intern Peemerintah (SPIP).
14. Kedua saudara saya, Meri dan Reni yang selalu memberikan semangat untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 Kampus Bukit Universitas Sriwijaya.

Semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan, penulis dengan senang hati akan menerima kritikan yang membangun tersebut. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, Juni 2022

Nini Marini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ABSTRACT ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Batasan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Landasan Teori 11
B. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah Oleh Inspektorat Kota Palembang 22
C. Teori Implementasi yang Digunakan dalam Penelitian 22

D. Kerangka Teori 23
E. Penelitian Terdahulu 27
F. Kerangka Pemikiran 39

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Desain Penelitian 40
B. Definisi Konsep 40
C. Fokus Penelitian 42
D. Informan Penelitian 44
E. Data dan Sumber Data 44
F. Teknik Pengumpulan Data 45
G. Teknik Keabsahan Data 46
H. Teknik Analisis Data 47
I. Sistematika Penulisan 49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50

A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Palembang 50
    1. Sejarah Berdirinya Inspektorat Kota Palembang 50
    2. Landasan Hukum Pembentukan Inspektorat Kota Palembang 53
    3. Visi dan Misi Inspektorat Kota Palembang 54
    4. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Palembang 56
    5. Tugas dan Fungsi Bidang Inspektorat Kota Palembang 57
    6. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palembang 60
B. Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan SPIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat di Kota Palembang 61
    1. Analisis Aspek Komunikasi dalam Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan SPIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat di Kota Palembang 61

2. Analisis Aspek Sumberdaya dalam Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan SPIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat di Kota Palembang..... 76
3. Analisis Aspek Disposisi dalam Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan SPIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat di Kota Palembang..... 93
4. Analisis Aspek Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pengawasan Inspektorat Pada Kebijakan SPIP Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat di Kota Palembang.....100

BAB V PENUTUP 110
A. Kesimpulan.....110
B. Saran.....113

DAFTAR PUSTAKA 115
LAMPIRAN 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pejabat/Pegawai Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota Palembang 3
Tabel 2. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP 6
Tabel 3. Sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 8
Tabel 4. Penelitian Terdahulu 27
Tabel 5. Kerangka Pemikiran 39
Tabel 6. Fokus Penelitian 42
Tabel 7. Matriks Temuan Penelitian 107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 7
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III 14
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn 16
Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palembang..... 60
Gambar 5. Surat Tugas SPIP dan Surat Gratifikasi 65
Gambar 6. Jadwal Sosialisasi SPIP..... 66
Gambar 7. Entry Meeting Inspektorat Kota Palembang dan OPD 71
Gambar 8. Salinan Peraturan BPKP 74
Gambar 9. Data Tim Pengawas SPIP Organisasi Perangkat Daerah..... 78
Gambar 10. Data Pegawai Inspektorat Kota Palembang Per 30/12/2021 79
Gambar 11. Daftar Nama Tim Validasi SPIP Organisasi Perangkat Daerah 83
Gambar 12. Grup WhatsApp SPIP Kota Palembang..... 87
Gambar 13. Fasilitas Inspektorat Kota Palembang..... 90
Gambar 14. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas 95
Gambar 15. Routing Slip Laporan Hasil Pemeriksaan 98
Gambar 16. SOP Pemeriksaan Fisik Lapangan dan SOP Pelaksanaan Pemeriksaan..... 102
Gambar 17. Konsultasi Inspektorat dengan BPKP dan OPD 105

DAFTAR SINGKATAN

SPIP	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
OPD	= Organisasi Perangkat Daerah
BPKP	= Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
JUKNIS	= Petunjuk Teknis
PKPT	= Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan
APIP	= Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
SOP	= Standar Operasional Prosedur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
SDM	= Sumber Daya Manusia
ST	= Surat Tugas
PPJ	= Pembantu Penanggung Jawab
Dalnis	= Pengendali Teknis
Plt	= Pelaksana Teknis
TPP	= Tunjangan Penambahan Penghasilan
BPKAD	= Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
QA	= Quality Assurance

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi..... 118
Lampiran 2 Suran Izin Penelitian dan Pengambilan Data ke Inspektorat Kota Palembang..... 119
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ke Dinas Kebudayaan dan Dinas PPPAPM Kota Palembang..... 120
Lampiran 4 Surat Balasan Instansi 121
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I..... 122
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II 123
Lampiran 7 Lembar Revisi Sempro Dosen Pembimbing I..... 124
Lampiran 8 Lembar Revisi Sempro Dosen Pembimbing II..... 125
Lampiran 9 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Penguji 1 126
Lampiran 10 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Penguji 2 127
Lampiran 11 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Pembimbing 1 128
Lampiran 12 Lembar Revisi Ujian Komprehensif Pembimbing 2 129
Lampiran 13 Matriks Wawancara..... 130
Lampiran 14 Dokumentasi..... 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hill dan Hupe (dalam Handoyo, 2012:94) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Dalam hal ini ada dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementor. Suatu implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Pengawasan pada dasarnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin dalam setiap organisasi. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan. Inspektorat merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengendalian internal di Indonesia, yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Terdapat empat lembaga APIP yaitu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota dan tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai. Dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan melalui pengendalian intern. Pengendalian intern ini sangat penting dalam suatu organisasi, karena dengan adanya pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan kinerja organisasi yang baik pula. Dengan kata lain, Pengendalian intern yang baik, akan berpengaruh untuk meningkatkan kinerja anggota dalam mencapai tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggaran Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelengaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Organsisasi dan tata laksana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Palembang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota Palembang. Satuan Tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP adalah tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.

Berikut pejabat/pegawai Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang:

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Walikota Palembang	Pembina
2	Wakil Walikota Palembang	Pembina
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Inspektur Kota Palembang	Ketua
5	Kepala BKP & SDM Kota Palembang	Wakil Ketua
6	Sekretaris Inspektorat Kota Palembang	Sekretaris
7	Kabag. Hukum Setda Kota Palembang	Anggota
8	IRBAN I Inspektorat Kota Palembang	Anggota
9	Kabag. Ortala Setda Kota Palembang	Anggota
10	IRBAN II Inspektorat Kota Palembang	Anggota
11	Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang	Anggota
12	Sekretaris BKP & SDM Kota Palembang	Anggota
13	Kabid. Diklat SDM BKPSDM Kota Palembang	Anggota
14	IRBAN III Inspektorat Kota Palembang	Anggota
15	IRBAN IV Inspektorat Kota Palembang	Anggota
16	Sekretaris BPKAD Kota Palembang	Anggota
17	Kabid. Akuntansi BPKAD Kota Palembang	Anggota
18	Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Kota Palembang	Anggota
19	Sekretaris Bappeda Kota Palembang	Anggota
20	Kabag. Umum Setda Kota Palembang	Anggota
21	Kabag. Keuangan Setda Kota Palembang	Anggota
22	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Palembang	Anggota
23	Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Palembang	Anggota
24	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Palembang	Anggota
25	Dr. Rosidin Hasan, M. PdI	Anggota
26	H. Izhar Zulfikar, SE	Anggota
27	Yubi Fajar Kesuma, SH, MM	Anggota

Lanjutan Pejabat/Pegawai Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota Palembang

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
28	Nurhayati, S.IP, M.Si	Anggota
29	Enni Zuraidah, S.Pd	Anggota
30	Yusrizal, SE	Anggota
31	Fia Mariestika, ST	Anggota
32	Erlinda, SE	Anggota
33	Aah Sholiha, SE	Anggota

Tabel 1. Pejabat/Pegawai Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP Kota Palembang
Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palembang Nomor 04.a Tahun 2017

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas membantu Walikota dalam pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan fungsi Inspektorat Daerah yaitu pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui:

1. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
2. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, strandar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
3. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan pengawasan lainnya adalah tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di luar tugas audit, reviu, evaluasi dan pemantauan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini umumnya diselenggarakan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan Kota Palembang agar apa yang direncanakan setiap OPD dapat terealisasi dengan baik. Pelaksanaan pengawasan SPIP oleh Inspektorat Kota Palembang tidak dilangksanakan sekaligus, mengingat jumlah OPD yang ada di lingkungan Kota Palembang. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Palembang melaksanakan pengawasan SPIP Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP. Dalam pelaksanaan SPIP, Inspektorat sangat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan maturitas SPIP. Untuk

melakukan penilaian implementasi SPIP disediakan media pengukuran maturitas SPIP yang terpola dalam enam tingkatan atau level. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dijelaskan pada tabel berikut:

TINGKAT/LEVEL	KARAKTERISTIK SPIP
0 (Belum Ada)	K/L/P sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
1 (Rinstisan)	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan msih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 (Berkembang)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 (Terdefinisi)	K/L/P telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 (Terkelola dan Terstruktur)	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun K/L/P. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 (Optimum)	K/L/P telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Tabel 2. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016

Berikut di bawah ini tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):

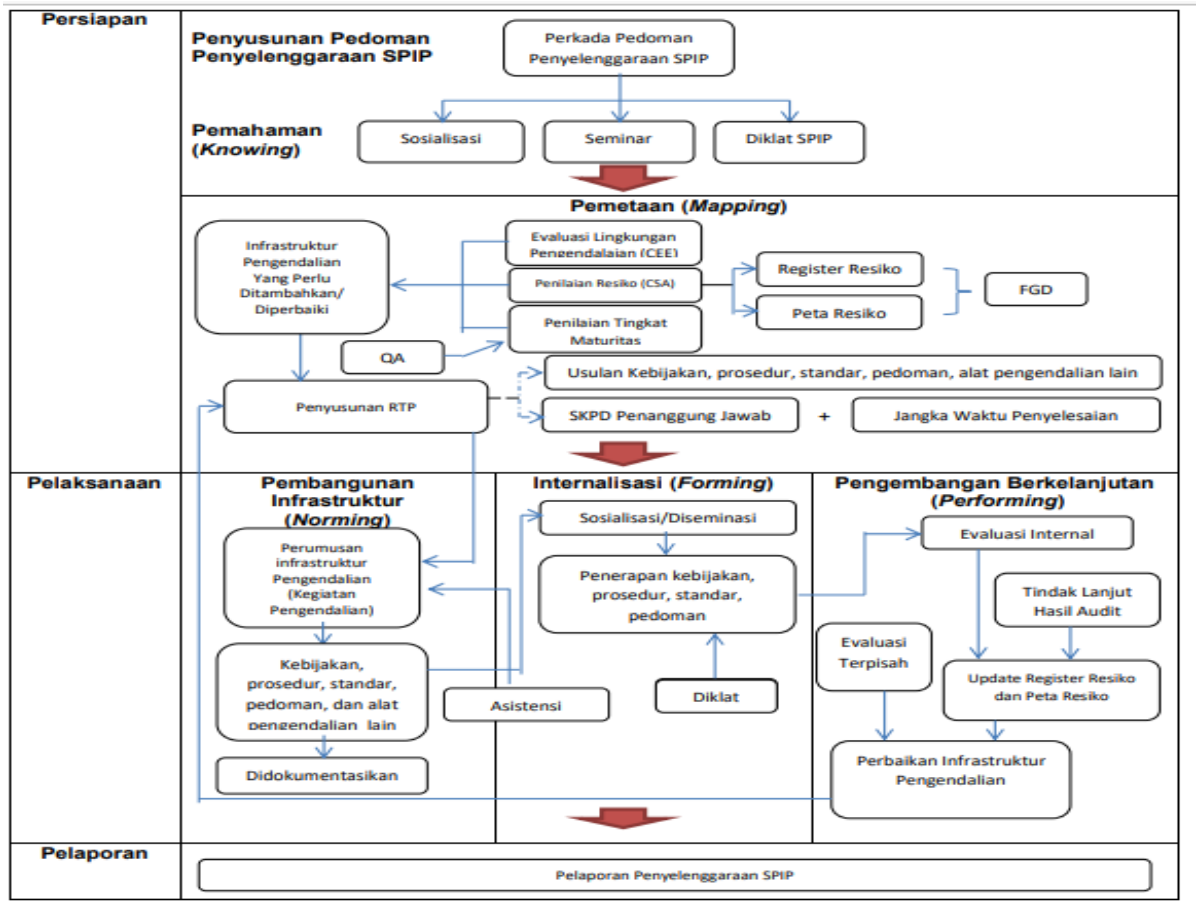

Gambar 1. Bagan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sumber: Dokumen tentang Gambaran Umum, Tahapan, Serta Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan SPIP

Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat Kota Palembang sering kali dihadapkan berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah. Rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan, khususnya di lingkungan Kota Palembang. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya keperdulian terhadap SPIP, keterbatasan sumberdaya pengawas sehingga fasilitas yang tersedia kurang optimal yang dapat menghambat proses pengawasan.

Berikut di bawah ini evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kota Palembang:

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Nilai	Tingkatan
1.	Dinas Kebudayaan	2.94.89	Berkembang
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPAPM)	1.744	Rintisan

Tabel 3. Sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palembang, 2020

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), pada tahun 2020 Inspektorat Daerah Kota Palembang telah menetapkan target indikator persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP pada level terdefinisi sebesar 25% atau sebanyak 13 OPD. Namun, Inspektorat Daerah Kota Palembang hanya melakukan evaluasi SPIP terhadap 2 OPD. Pada tahun sebelumnya capaian indikator ini sebesar 61.5%. Turunnya capaian ini salah satunya disebabkan adanya pergeseran anggaran kegiatan dialihkan ke kegiatan yang berkaitan dengan audit, reviu dan evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa yang lebih memprioritaskan kegiatan berkaitan dengan covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu diamati lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan kendala yang dihadapi guna mencapai tata pemerintahan yang baik dimuat dalam penelitian berjudul “Implementasi Pengawasan Inspektorat Kota Palembang Pada Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan dan supaya peneliti dapat mendalami maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan masalah yang terjadi di atas, maka perlu adanya batasan yang jelas dalam penelitian ini, yaitu data diperoleh dari Inspektorat Kota Palembang untuk membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai bahan masukan dalam kajian Ilmu Administrasi Publik khususnya implementasi kebijakan publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pihak yang terkait dalam melaksanakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan Inspektorat pada kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdoellah, Awan & Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Revisi Ke-2).* Bandung: CV. Alfabeta

Hardani & dkk. 2020. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Widya Karya dan Anggota IKAPI Nomor 117/JTE/2008

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas).* Gorontalo: UNG Press Gorontalo

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensia Media

Situmorang, Chazali. 2016. *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI)

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subianto, Agus. 2012. *Kebijakan Publik (Tinjauan Perencaan, Implementasi dan Evaluasi).* Surabaya: Brilliant

Suwanda, Dadang & Dailibas. 2013. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta Pusat: Penerbit PPM

Peraturan Perundang-undangan:

Dokumen tentang Gambaran Umum, Tahapan, serta Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran SPIP

Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palembang Nomor 04.a Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Palembang Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Surat Keputusan Inspektur Kota Palembang Nomor 331 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Jurnal:

Anisa, Via Nur & Syarief, Ahmad. 2020. Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Volume 3. Nomor 3. (https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/iarj/article/download/28/9 diakses pada Oktober 2020).

Hasby, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati. Analisis Peran Inspektorat dalam Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Volume 26. Nomor 4. (https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/7880 diakses pada 2018).

Nursalim. 2018. Implementasi Kebijakan tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017. Volume 5. Nomor 3. (https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1671).

Rachman, Muhammad Andrian Nur. 2015. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Inspektorat Kota Kediri).

Satya, Venti Eka. 2017. Penerapan dan Perspektif Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Yogyakarta. Volume 22. Nomor 2. (https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1516 diakses pada tahun 2020).